

Terorisme Radikalisme dan Identitas Keindonesiaan

Anastasia Yuni Widyaningrum,

Noveina Silviyani Dugis

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

Jalan Raya Dinoyo, Surabaya, Indonesia

Email: anastasia_widya@ukwms.ac.id / Phone +62 89651263296

How to Cite This Article:

Widyaningrum, A.Y., & Dugis, N.S. (2018). Terorisme Radikalisme dan Identitas Keindonesiaan. *Jurnal Studi Komunikasi*, 2(1). doi: 10.25139/jsk.v2i1.368

Received: 12-09-2017,

Revision: 22-11-2017,

Acceptance: 23-11-2017

Published online: 01-03-2018

English Title: Terrorism Radicalism and Indonesianness Identity

Abstract *Terrorism and radicalism in Indonesia often raise fundamental questions about Indonesia's sense of Indonesianness. Moreover, the perpetrators are also citizens of Indonesia then it is interesting to be studied more deeply how Indonesian citizens of Indonesia when events that shake the diversity of Indonesia. As destiny becomes a diverse and multicultural Indonesia. The method used in this research is the encoding and decoding of Stuart Hall which attempts to represent the meaning of "menjadi Indonesia" in the three readings of dominant hegemonic, negotiable and opposition. Studies on Islamism and Indonesianness are used to describe interview data. The results showed that Indonesianness strengthened. In the third reading, the informants rejected that their Indonesians were torn apart by the actions of radicalism and terrorism.*

Keywords: *terrorism; radicalism; Indonesianness; Islamness; nation; encoding-decoding*

Abstrak Aksi terorisme dan radikalisme yang terjadi di Indonesia seringkali menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai rasa keindonesiaan bangsa Indonesia. Apalagi pelaku aksi adalah warga negara Indonesia maka menarik untuk dikaji lebih mendalam bagaimana keindonesiaan warga negara Indonesia ketika terjadi peristiwa yang menggoncang keberagaman Indonesia. Indonesia yang beragam dan multibudaya kemudian terguncang akan peristiwa radikalisme dan terorisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah encoding dan decoding dari Stuart Hall yang berusaha merepresentasikan pemaknaan menjadi Indonesia dalam tiga pembacaan yaitu dominan hegemonik, negosiasi dan oposisi. Kajian-kajian tentang keislaman dan keindonesiaan digunakan untuk menjelaskan data-data hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keindonesiaan para informan justru semakin menguat. Dalam ketiga pembacaan para informan menolak bahwa keindonesiaan mereka terkoyak oleh aksi radikalisme dan terorisme.

Kata Kunci: terorisme; radikalisme; keindonesiaan' keislaman; bangsa; encoding decoding

PENGANTAR

Waspada! penyebaran radikalisme yang tak kasat mata! (Kompas.com, edisi 10 Juli 2017) *Radikalisme: Ancaman Nyata Pemuda Tanah Air* (Liputan6.com, edisi 25 Juli 2017); *Radikalisme adalah Musuh Bersama* (metrotvnews.com, edisi 14 Agustus 2017); *Ketum PPP Ingatkan Bahaya Radikalisme Berkedok Agama* (metrotvnews.com, edisi 26 Agustus 2017). Begitulah judul-judul pemberitaan yang dilansir oleh berbagai media *online*. Maraknya praktik kekerasan yang mengatasnamakan golongan tertentu memang kian ramai dibahas di media-media massa Indonesia. Praktik tersebut oleh media kemudian didekatkan dengan konsep atau paham yang populer disebut radikalisme.

Konsekuensi penggunaan istilah radikalisme sendiri menuntut adanya pemahaman yang baik dalam konteks yang tepat pula. Merujuk pada ragam sumber yang membahas mengenai arti kata radikalisme, dapat dikatakan bahwa radikalisme adalah suatu paham yang menginginkan perubahan dan pembaharuan secara drastis hingga ke titik paling mendasar dari sebuah kerangka berpikir. Lebih jauh, radikalisme bahkan menuntut terjadinya perubahan tersebut dengan cara yang paling ekstrem hingga melibatkan kekerasan baik fisik maupun non-fisik.

Radikalisme juga kerap dikaitkan dengan konsep agama yang kemudian sering disebut radikalisme agama sehingga menjadi persoalan yang berhubungan dengan pengalaman inti, memori kolektif dan penafsiran agama (Zuhdi, 2017:199). Secara umum setiap agama memiliki dua fungsi: pertama, fungsi manifesto, yaitu fungsi yang disadari betul oleh para pengikutnya sebagai manifestasi objektif dari suatu sistem sosial. Kedua, fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak dikehendaki secara sadar dari sistem sosial tersebut dalam memunculkan radikalisme, dan agama merupakan lahan empuk untuk menjadi *crying banner* dalam melakukan tindakan radikalisme.

Peristiwa demi peristiwa yang ditengarai sebagai praktik dari paham radikalisme yang berakar pada rasa fanatisme juga kian mewarnai wajah berita Indonesia. Menurut Haryatmoko (2014: 113) dari sisi pelaku, proses

menjadi fanatik dan menolak yang berbeda menyebabkan orang lepas dari tanggung jawab terhadap tindakannya. Segala tindak kekerasan yang dilakukannya bersembunyi dibalik pembenaran simbolis, ideologis, atau teologis. Dalam konteks ini seakan pelajaran agama kurang mendapatkan tempat. Namun dijelaskan pula oleh Haryatmoko bahwa masalahnya bukan pada pelajaran agama, melainkan pada bagaimana disampaikannya. Banyak kisah tentang pelajaran agama yang dijadikan alat pencuci otak sejak masih kanak-kanak oleh para guru agama, pemuka agama, atau pengkhotbah yang beredar di masyarakat (Haryatmoko, 2014: 113-114).

Lebih lanjut dalam sub-bahasannya yang berjudul '*Jangan Biarkan Agama Menjadi Landasan Ideologis Kekerasan!*' Haryatmoko (2014: 69-71) juga menjelaskan tentang konsep agama yang seringkali berwajah dua dan saling bertentangan. Pada satu sisi, agama merupakan tempat dimana orang menemukan kedamaian, kedalaman hidup, dan harapan yang kukuh; disisi lain agama seringkali dikaitkan dengan fenomena kekerasan dan berbagai peristiwa konflik karena agama. Hal inilah yang menunjukkan adanya mekanisme tertentu dalam agama yang rentan terhadap kekerasan dan konflik.

Pada dasarnya, gejala tindakan yang bermuatan kekerasan dan menjadi pemicu konflik dapat terjadi ketika kecintaan akan sistem nilai tertentu terus ditumbuhkembangkan sehingga bermuatan politis. Dengan memojokkan orang lain atas kepemilikan agamanya atau etnisnya, maka tindakan kebencian sebenarnya sedang berlangsung dalam bentuk penolakan dan perlawanan, terutama aspek ide dan kelembagaan yang dianggap bertentangan dengan keyakinannya. Bentuk penolakan dan buah kebencian inilah yang seringkali menjadi penyebab utama kekerasan massal. Upaya untuk menguatkan sistem nilai dan cara pandang yang merujuk pada tataran ideologi tertentu pada akhirnya akan menguatkan sendi-sendi keyakinan akan kebenaran ideologi tertentu yang lebih unggul daripada yang lain.

Hal ini kemudian dikritisi oleh Haryatmoko (2014: 130) yang menegaskan bahwa keyakinan ideologis semacam inilah yang mendorong dedikasi pengorbanan, tetapi juga membawa kepada tiadanya toleransi, tidak peka lagi terhadap kekejaman dan kekerasan. Terlebih lagi ketika kehidupan bersama sudah berada pada era demokrasi yang memberikan kebebasan kepada siapapun untuk dapat mengekspresikan ide dan gagasannya. Maka seolah praktik radikalisme sebagai bentuk pemutakhiran ide dan gagasan menjadi sah saja dalam kehidupan bermasyarakat yang demokratis.

Dalam masyarakat yang majemuk dimana konflik kepentingan menjadi langganan, nilai demokrasi kemudian menjadi harapan untuk resolusi konflik secara damai. Atas nama demokrasi, setiap insan manusia idealnya mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas dirinya sendiri. Demokrasi kemudian seringkali diidentikkan dengan kebebasan mengungkapkan pendapat. Kebebasan berpendapat sebagai salah satu bentuk ekspresi diri dan menjadi hak setiap insan manusia lalu menjadi kunci dalam perdebatan praktik radikalisme yang kian tumbuh di berbagai lapisan masyarakat. Praktik radikalisme lalu dinilai sama dengan bentuk ekspresi diri yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Peralannya, ketika setiap individu dan kelompok sudah menemukan ruang untuk berekspresi (apapun), maka pada titik inilah paham radikalisme mulai masuk dan dimainkan oleh para aktor kepentingan tertentu.

Dalam konteks pembahasan ini, Kompas (kompas.com, diakses 3 September 2017), edisi 5 Mei 2017 berjudul '*Radikalisme dan Politik Identitas*, paham radikalisme yang diinstrumentalisasi dalam berbagai bentuk dan maksud oleh kelompok-kelompok revivalis dilatari oleh beberapa persepsi dan alasan, seperti tidak-adilan yang dialami rakyat, korupsi yang menggurita, krisis ekonomi-politik, dan kesenjangan kaya-miskin. Dalam pandangan mereka, hal ini terjadi karena sistem negara Indonesia yang terlalu berkiblat kepada demokrasi dan "memberhalakan" Pancasila. Oleh karena itu, kelompok ini mengajukan syariah sebagai satu-satunya pandangan dunia (*world view*) yang harus dijadikan sebagai landasan konstitusi maupun dasar negaranya.

Apa yang kita saksikan dalam beberapa bulan ini, di mana pintu masuk paham radikalisme yang digerakkan kelompok revivalis melalui momentum Pilkada DKI, menjadi bukti betapa mereka ingin mereaktualisasi paham radikalisme. Bahkan, gerakan massa yang dilabelisasi dengan 411, 212, 313, dan semacamnya menjadi sebuah rejuvenasi radikalisme yang memanfaatkan pergerakan massa yang disulut dengan semangat populisme.

Dengan melibatkan berbagai aktor, baik di kalangan politisi, agamawan, pengusaha, dan tokoh masyarakat lainnya, paham radikalisme kian ditasbihkan sebagai satu-satunya cara untuk melakukan perubahan Indonesia yang lebih baik. Berbagai adagium agama diserukan dalam altar pergerakannya untuk memicu emosi publik-terutama sekelompok orang yang berafiliasi dengan pergerakan ini.

Meskipun dalam amatan sementara, gerak radikalisme yang diekspresikan oleh kelompok revivalis ini tidak berhubungan dengan perilaku terorisme, bahkan mungkin juga tidak ada niatan dalam benak mereka untuk memperlebar paham radikalisme menjadi aksi terorisme.

(Sumber: '*Radikalisme dan Politik Identitas*,' Ghufron dalam Kompas, 5 Mei 2017).

Bahasan mengenai radikalisme kemudian menjadi lebih menarik ketika paham radikalisme menjelma menjadi aksi terorisme. Dalam perspektif kritis, setiap gerakan yang berlandaskan paham radikalisme pasti terselubung agenda politik kekuasaan tertentu yang dimanfaatkan pihak tertentu

untuk menjadikan gerakan radikalisme sebagai aksi teror dan meresahkan. Tak jarang pula gerakan radikal ini dijadikan *kedok* untuk melakukan perlawanan terhadap sistem pemerintahan atau sekedar menebar teror di masyarakat.

Beberapa peristiwa teror bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia pada bulan Ramadan tahun 2016 seakan membawa kembali memori tentang berbagai peristiwa berlabel terorisme di tanah air. Indonesia kemudian disebut-sebut sebagai 'sarang terorisme' tempat para teroris mengatur strategi pengeboman dan mengeksekusinya. Mereka memegang prinsip 'menghalalkan segala cara' dimana cara berpikir ini menurut Haryatmoko (2014: 111) justru akan menumpulkan nurani dan memperlakukan orang lain sebagai alat kepentingan dirinya dan kelompoknya.

Menyadari bahwa makin meluasnya praktik kekerasan yang ditunggangi kepentingan politik tertentu, peran media massa menjadi penting dalam menyajikan peristiwa ke hadapan publik yang majemuk. Tugas media bukan saja soal melaporkan peristiwa yang akurat, namun juga memiliki tugas untuk menyosialisasikan pentingnya penyelesaian konflik. Selain itu, media massa juga dituntut mampu menyosialisasikan toleransi ketidaksepakatan. Dimana ketidaksepakatan ini menurut Ida & Subiacto (2012: 57), dapat dimaknai sebagai buah demokrasi yang indah, bukannya dijadikan landasan untuk berkonfrontasi.

Media massa dituntut secara demokratis mampu memberikan laporannya yang merepresentasikan opini masyarakat yang majemuk sekaligus pemenuhan atas '*people's right to know*' dan yang sesungguhnya terjadi. Kemampuan media mengungkap komunikasi politik dalam sistem demokrasi tentunya juga memerlukan kompetensi demokrasi pada khalayaknya. Penelitian ini pada akhirnya menggunakan metode *Reception Analysis* dengan model *encoding-decoding* yang ditawarkan oleh Stuart Hall. Hall mengetengahkan inti dari teori ini adalah pada proses *encoding* (memberikan pesan) dan *decoding* (memaknai pesan).

McQuail (1997: 18) menjelaskan mengenai kaitan tradisi kultural dan *Reception Analysis* (analisis penerimaan atau analisis pemaknaan). Kaitan ini terutama menekankan bagaimana penggunaan media sebagai bentuk refleksi dari praktik praktik sosial tertentu dan bagaimana sebagai proses pemberian makna pada produk budaya dan pengalaman akan hal tersebut. Secara sederhana, McQuail mengatakan bahwa, manusia secara personal sebagai bagian kecil dari konteks besar masyarakat belajar dan memahami dirinya salah satunya adalah melalui media. Media menjadi bagian integral untuk membentuk identitas dirinya sebagai bagian dari lingkungan budaya yang lebih makro.

Konsep ini mengacu kepada bagaimana khalayak memahami dan pemahaman tersebut muncul dari saling berbagi pengalaman antar anggota dalam kelompok sosialnya. Berdasar penjelasan McQuail ini, maka eksplorasi kepada latar belakang *audiences*/khalayak menjadi penting dan harus dilakukan dan menjadi bagian integral dari analisa data. Oleh karena itu, *audience* diasumsikan sebagai khalayak yang aktif memaknai, *audience* yang aktif memaknai sekaligus merupakan kritik terhadap kajian *audience* pada *paradigm positivism*.

Kemudian, *Reception Analysis* menjadi metode yang efektif untuk meneliti khalayak dalam kajian studi budaya (*Cultural Studies*). Khalayak merupakan sekelompok orang yang memaknai teks dan tidak dapat dilihat dalam satu bentuk. Khalayak dalam *Reception Analysis* diasumsikan heterogen dan mempunyai *frame of reference* dan *field of experience*. Kemudian media menjadi sebuah alat penyebaran informasi yang dipertanyakan kebenarannya. Pada bagian lain, Hartley (2003: hal.11) menjelaskan bagaimana *Cultural Studies* bekerja pada berbagai macam teks dan latar belakang sosial bagaimana teks diproduksi terutama ketidakberimbangan pada relasi tersebut. Pada posisi ini, media dianggap menjadi sebuah medium yang mampu untuk memberikan kesempatan keberimbangan. *Cultural Studies* kemudian meluas kajiannya pada budaya populer, (*sub*) *cultures*, produk media (drama, jurnalistik, music), kehidupan sehari-hari, kota dan pedesaan, subjektifitas, ideologi, hegemoni. *Discourse*, kekuasaan,

visualitas, manusia dan teknologi, relasi publik dan domestik, praktik dan lingkaran kelompok marginal, transnasionalisme, kolonial dan imperial, dll.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia terus menjadi bagian dari perbincangan internasional dengan terus menerusnya peristiwa yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Dimulai dengan peristiwa Bom Bali yang dengan sengaja memberi pesan kepada dunia internasional akan adanya sentimen terhadap Amerika Serikat. Kemudian peristiwa menjadi beruntun dengan adanya berbagai peristiwa pemboman di Jakarta dan Bom Bali II. Peristiwa-peristiwa dengan latar belakang radikalisme tersebut kemudian menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat perhatian dunia.

Indonesia, dianggap sebagai negara yang berbahaya hingga dikeluarkan *travel warning* dari negara-negara besar. Indonesia, yang sebelumnya identik dengan penduduknya yang ramah menjadi sebuah negara yang penduduknya membahayakan bagi bangsa lain. Dalam konteks tersebut, identitas keindonesiaan dipertaruhkan. Sekian juta masyarakat Indonesia yang tidak terlibat dalam kegiatan terorisme kemudian bersama-sama menanggung akibat peristiwa radikalisme yang kemudian mengarah ke terorisme yang sebenarnya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Indonesia, yang berdiri secara *de facto* berangkat dari keberagaman dari berbagai segi seolah mendapat ujian dikarenakan peristiwa yang mengguncang Indonesia dan dunia. Identitas keindonesiaan kemudian mencari bentuknya lagi. Simon Anholt (2007) mengkaji hal-hal apa yang berkaitan dengan identitas sebuah negara. Dalam kajiannya Anholt pada tahun 2003 dalam buku *Brand New Justice* merumuskan setidaknya ada beberapa aspek yang berkaitan dengan identitas sebuah negara. yaitu masyarakatnya, budaya, investasi, kebijakan, pariwisata, dan *branding* negara tersebut (2007: hal. 26). *People* atau masyarakat menjadi bagian penting dari identitas sebuah negara bersamaan dan berkaitan dengan komponen lain yang

memiliki porsi tanggung jawab yang sama. Anholt (2007: hal. 25) menjelaskan demikian, bahwa masyarakat dari sebuah negara itu sendiri dimana mempunyai kepemimpinan yang kuat dan media serta atlet olahraga yang terkenal (di dunia, peneliti), dan juga populasi secara umum. Bagaimana mereka (warga negara tersebut) berperilaku ketika berada di luar negeri dan bagaimana mereka memperlakukan warga negara lain ketika berujung ke negara tersebut. Maka, menjadi menarik bahwa salah satu pesan gerakan terorisme dan radikalisme ini adalah sebuah gerakan penolakan terhadap budaya/ pemikiran yang dianggap berbeda dari kelompok tersebut. Dimana, *asing* kemudian diartikan adalah Amerika Serikat sebagai sebuah negara dan segala sesuatu tentang Amerika Serikat.

Maka menjadi menarik, ketika persoalan identitas keindonesiaan ini kemudian dicari bentuk dan maknanya dalam masyarakat Indonesia. Terutama bagaimana menjadi Indonesia dalam dalam perjalanan pencarian makna tersebut, media menjadi bagian penting didalamnya.

Studi mengenai *audience* setidaknya dibagi dalam dua kutub tradisi. Dalam tradisi *positivism* penelitian *audience* lebih mencari kondisi di lapangan/masyarakat bagaimana situasi *audience*. Bagi industri media, penelitian *audience* sangat membantu untuk dapat memetakan pasar bagi industri media. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan, ketertarikan dan isu yang disukai atau menjadi *trending* bagi masyarakat. Sedangkan di kutub seberang dari *positivism* adalah interpretatif. Pada kutub interpretatif, studi media dan *audience* menjawab relasi yang berkesinambungan antara media dan *audience*. *Audience* tidak lagi diposisikan sebagai entitas yang pasif namun sebaliknya, *audience* sangat aktif dalam memaknai isi media. Hal ini terutama disebabkan oleh latar belakang dari *audience* yang sangat beragam, maka *audience* tidak lagi diam dalam memaknai isi media.

Pemaknaan isi media dalam kutub interpretatif menekankan bagaimana media digunakan sebagai bentuk refleksi oleh kelompok sosial budaya tertentu dan sebagai bagian dari proses memberikan makna Hall dalam McQuail

(1997: hal.18). Sedangkan Lindlof (McQuail, 1997: hal 19) menekankan bahwa *media reception* adalah studi mengenai *audience* sebagai masyarakat yang memaknai. Maka menurut McQuail (1997: hal 19), *Reception Analysis*, sangat efektif sebagai penelitian khalayak dalam *cultural studies*. Peran 'pembaca' atau khalayak dalam proses '*decoding*' dari teks media. Khalayak secara sadar berpikir kritis untuk menolak, menegosiasikan, bahkan menerima makna yang ditawarkan media.

Dalam kajian Mujiburrahman (2008:7) secara umum kajian teoretis mengenai fundamentalisme Islam dikelompokkan dalam dua jenis. *Pertama*, teori yang melihat fundamentalisme Islam merupakan sebuah kesinambungan sekaligus sebuah perubahan dalam sejarah Islam. *Kedua*, fundamentalisme sebagai sebuah reaksi dari berbagai tantangan dan peluang di era modern.

Fundamentalisme sebagai bentuk kesinambungan dan perubahan dijelaskan oleh Mujiburrahman (2008: hal.7-8) berdasarkan penjelasan Ernest Gellner (1995). Menurut Gellner fundamentalisme Islam mempunyai kesinambungan dengan sejarah panjang umat Islam dan juga perubahan social. Secara umum Islam ada dua model yaitu Islam tinggi (*high tradition*) dan Islam rendah (*low tradition*). Islam tinggi adalah Islam lebih dekat dengan ajaran di Kitab Suci dan tinggal di perkotaan sedangkan Islam rendah merupakan Islam yang berakulturasi dengan budaya lokal dan umumnya tinggal di pedesaan. Kedua model ini dalam perjalanannya saling berdialog dan berinteraksi. Secara umum fundamentalisme terjadi ketika budaya-budaya lokal mengalami kemerosotan moral, maka Islam rendah berusaha untuk melompat ke Islam tinggi dalam rangka mengatasi kemerosotan tadi. Sehingga, kesimpulan Gellner adalah, gerakan fundamentalisme Islam adalah gerakan yang mencoba melakukan pembaharuan Islam rendah menjadi Islam tinggi.

Dalam catatan Ahmad Musyafiq (2012: 58-59) dikatakan bahwa pola-pola fundamentalisme di Indonesia merupakan gerakan pemurnian ajaran agama. Namun dari segi gerakan mereka menyuarakan negara Islam dan tidak

jarang menggunakan pola-pola kekerasan sehingga sering diidentifikasi sebagai kelompok radikal. Pelopor gerakan ini di Indonesia adalah Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam dan Forum Komunikasi *Ahlussunnah wal-Jamaah* yang lebih dikenal sebagai Laskar Jihad. Hizbut Tahrir Indonesia yang mulai menampakkan diri di Indonesia pasca kejatuhan rezim Orde Baru memang merupakan sebuah gerakan politik. Dengan tegas mereka menyatakan diri sebagai gerakan politik, bukan lembaga agama dan bukan pula lembaga pendidikan. Namun dalam praktiknya mereka juga memiliki salah satu divisi dakwah yang melakukan pendalaman terhadap ajaran-ajaran Islam.

Apa yang disampaikan oleh Musyafiq diatas merupakan penjelasan dari yang disampaikan oleh Gellner. Hizbut Tahir Indonesia yang pada awalnya adalah gerakan politik kekecewaan akan Orde Baru namun kemudian divisi dakwah yang didirikan berusaha untuk melakukan pendalaman terhadap agama Islam. Pada bagian lain Musyafiq (2012: hal. 62) menjelaskan mengenai Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem kekhilafahan dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan.

Sedangkan fundamentalisme Islam sebagai bentuk reaksi atas tantangan dan peluang di era modern dijelaskan oleh Mujiburrahman (2008:17-18) bahwa situasi krisis sosial, politik, ekonomi dan budaya yang menimpa kaum muslim di era modern memuluskan gerakan fundamentalisme Islam. Perkembangan teknologi komunikasi, transportasi, informasi dan juga globalisasi menjadikan kemudahan dalam bentuk apapun. Kekalahan negara-negara Arab melawan Israel di tahun 1948 dan 1956, Revolusi Iran 1979, pelecehan terhadap Islam seperti

karya Salman Rusdie, Perang Teluk 1990-1991, runtuhnya Soviet, runtuhnya WTC New York 11 September 2001, dll.

Sementara itu kaitan antara Islam dan nasionalisme dijelaskan Mukodi & Burhanuddin (2016: hal. 384) bahwa dasar nasionalisme dapat diketemukan dalam ayat-ayat al-Qur'an yang dimuat di al Baqarah disebutkan demikian: "*Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa.."* (QS. al Baqarah [2]: 126). Mukodi dan Burhanuddin melihat bahwa dasar Alquran tersebut digunakan sebagai dasar perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa mendasarkan diri pada formalisasi syariat Islam. Kelompok ini menyatakan bahwa kehidupan spiritual diatur oleh agama sedangkan kehidupan duniawi diatur oleh logika duniawi. Pemikiran ini seakan-akan mengandung unsur sekularistik, yaitu adanya pemisahan agama dengan dunia, meskipun sejatinya hanya pemisahan wilayah.

Alat analisis yang ditawarkan Stuart Hall (1972) dalam *Reception Analysis* adalah dengan *encoding dan decoding*. Ida (2014, hal. 178-179) menyebutkan bahwa *Encoding Decoding* mengasumsikan bahwa *audience* dengan latar belakang yang berbeda-beda akan melakukan interpretasi yang beragam pula dari teks yang dihasilkan oleh media. Dengan begitu maka teks tidak pernah pasti dan bermakna tunggal. Tiga bentuk interpretasi tersebut dikenalkan oleh Stuart Hall dengan posisi pembacaan dominan-hegemoni (*dominant-hegemonic position*), negosiasi (*negotiate code*), posisi ketiga adalah oposisi (*oppositional code*). Posisi pertama, dominan hegemoni, disini *audience* menerima program atau teks media secara penuh, menerima begitu saja ideologi dominan tanpa ada penolakan atau ketidaksetujuan. Disini *audience* menjelaskan kehidupannya mereka sendiri, perilaku dan pengalaman sosial dalam ideologi ini. Sedangkan pada tipe kedua, *negotiate code audience* bertindak adaptif dan tidak langsung menyetujui. Pada posisi kedua ini, pengalaman sosial yang spesifik menjadi penting dalam proses interpretasi. Sedangkan pada posisi ketiga, *oppositional code*, ketika *audience* menolak

yang ditawarkan oleh media dan audience mempunyai cara yang berbeda dalam melakukan pemaknaan.

Berikut ini list diskusi dan hasil pemetaan *encoding decoding*:

Tabel 1.

Hasil Diskusi dan Pemetaan *Encoding Decoding*

Pertanyaan	Informan			
	Sandy	Herlina	Susilo	Sheilla
1. Bibit radikalisme berada di lingkungan terdekat	DH	N	O	N
2. Islam Identik dengan radikalisme	O	O	O	N
3. Tuntutan terorisme akan keberagaman	DH	N	N	O
4. Terorisme berbasis radikalisme Islam di Indonesia	N	-	DH	N
5. Pesimisme tentang keberagaman	N	-	N	N
6. Interaksi dengan bangsa lain dan persepsi tentang Indonesia jika dikaitkan dengan terorisme	DH	DH	N	DH
7. <i>Fairness pemberitaan</i>	N	-	N	DH

<i>terorisme di media</i>				
8. Pendiskreditan pihak tertentu dalam pemberitaan tentang terorisme dan radikalisme	N	-	N	N
9. Keindonesiaan dan pemberitaan tentang terorisme di Indonesia	N	-	-	-
10. Pengalaman berinteraksi dengan bangsa lain dalam perbincangan tentang terorisme	O	DH	-	N
11. Narasi tentang diri sendiri dan keindonesiaan	O	DH	-	N

Dengan rincian latar belakang sebagai berikut:

Informan 1: Sandy, seorang laki – laki berusia 33 tahun, dengan suku bangsa Jawa dan beragama Katolik. Aktivitas sehari – hari sebagai mahasiswa dan calon Pastor Katolik.

Informan 2: Herlina, seorang perempuan berusia 43 tahun, dengan suku bangsa Batak dan beragama Kristen. Aktivitas sehari – hari seorang kandidat Doktor yang berdomisili di Inggris.

Informan 3: Shella, seorang perempuan berusia 37 tahun dengan suku bangsa Jawa dan beragama Islam. Aktivitas sehari – hari sebagai Ibu Rumah Tangga.

Informan 4: Susilo, seorang laki – laki berusia 47 tahun dengan suku bangsa Jawa dan beragama Islam. Aktivitas sehari – hari sebagai seorang kepala desa.

DISKUSI DAN ANALISIS

Radikalisme dalam Pembacaan Dominan

Aksi terorisme di pusat-pusat kota, ancaman bom di tempat-tempat ibadah, sampai praktik kekerasan dan aksi radikalisme yang terjadi (bahkan) di ada indikasi juga merebak di lingkungan lembaga pendidikan, kian membawa nama Indonesia menjadi sorotan dunia dalam isu keamanan global. Peristiwa Bom Bali tahun 2002 silam dianggap sebagai aksi terorisme terparah dalam sejarah Indonesia, sekaligus merupakan puncak awal dimana aksi radikalisme mengguncang dunia Internasional. Pulau Bali yang dikenal sebagai *headquarter* pariwisata di Indonesia menjadi sasaran aksi terorisme saat itu. Nama Indonesia kemudian ikut tenar dan menjadi pusat perhatian dunia lantaran peristiwa mencekam tersebut.

Dalam perkembangannya, isu radikalisme dan terorisme tidak lagi menjadi isu yang 'jauh' dari lingkungan masyarakat. Di berbagai lapisan masyarakat membicarakan isu tersebut dalam berbagai topik. Diskusi tentang penyebaran isu dan mendeteksi bibit-bibit radikalisme yang dijumpai para informan dalam penelitian ini kemudian menjadi menarik untuk dibahas. Menurut Sandy, topik tentang radikalisme terkadang menjadi bahan perbincangan dalam lingkungan pergaulannya.

“...Sejauh ini, di sekitar saya, terutama di komunitas seminari, isu radikalisme masih sebatas pada perbincangan mengenai berbagai peristiwa aksi kekerasan dan ujaran kebencian atas

nama agama yang marak dikabarkan media cetak, *online*, dan TV. Oleh karena itu, setiap anggota komunitas bebas untuk menyatakan pendapatnya dan menanggapi. Beberapa topik yang sering dibicarakan adalah mengenai peristiwa, korban jiwa, pelaku, hingga motif pelaku. Dengan kata lain, isu radikalisme masih sering menjadi topik perbincangan seiring maraknya aksi terorisme akhir-akhir ini, khususnya di Inggris, Indonesia, dan Filipina...”

Sandy dan kawan-kawannya tidak saja membicarakan aksi radikalisme di Indonesia saja namun juga radikalisme yang melanda berbagai negara di dunia. Konteks radikalisme yang dibahas dalam perbincangan Sandy dan rekan-rekannya di seminari (sekolah setingkat Universitas untuk para calon pastor Katolik) memang tak lepas dari pemberitaan media massa. Semakin maraknya pemberitaan mengenai aksi terorisme dan praktik radikalisme di masyarakat, maka semakin sering pula khalayak seperti Sandy menerima pesan radikalisme melalui media massa baik cetak, *online*, maupun media elektronik seperti televisi. Salah satu artikel berita yang menjadi bahan diskusi dalam penelitian ini yang berjudul '*Keamanan di Indonesia Serentak Diperketat usai Teror Bom*' (www.cnnindonesia.com, edisi 06/07/2016), dituliskan tentang maraknya ledakan bom di beberapa negara membuat keamanan Indonesia diperketat. Apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri umat Muslim saat itu, di Surakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia juga diguncang isu bom bunuh diri. Bagi Sandy, pemberitaan tentang teror bom di saat menjelang hari raya keagamaan seperti ini tentu akan berimbas pada stabilitas kebhinekaan bangsa. Indonesia dengan keragaman Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) ini menjadi lahan empuk untuk menebarkan isu konflik berbau SARA.

Melihat sejarah pengalaman Indonesia dengan peristiwa konflik yang kerap terjadi di tanah air, maka peran media sebagai ujung tombak informasi menjadi sangat

penting dan krusial. Dalam menjalankan tugasnya, media seringkali dikaburkan dengan kepentingan-kepentingan tertentu dalam meliput dan melaporkan peristiwa. Setiap media memang memiliki gaya dan cirinya masing-masing dalam mengemas berita, namun yang tidak bisa ditawar ketika meliput peristiwa konflik dan kekerasan dalam konteks radikalisme adalah soal keterlibatannya untuk ambil bagian dalam meminimalisir bahkan menjadi bagian dari solusi atas aksi radikalisme.

Hal ini juga disampaikan oleh Siregar (1998: 19), yang menegaskan pilihan dan tujuan media massa ketika memuat berita. Ada media massa yang mementingkan tujuan politik keredaksiannya dan ada pula media massa yang mementingkan kualitas informasi yang disajikan kepada khalayaknya. Ada pula media massa yang menganggap informasi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan ideologis. Informasi disampaikan untuk mempengaruhi dan membujuk khalayak agar berbuat dan bersikap sesuai dengan tujuan ideologis yang hendak dicapai oleh media massa tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tujuan ideologis media sangat erat kaitannya dengan faktor kepentingan dan doktrin tertentu yang dianut oleh media tersebut.

Seringkali dalam pemberitaan media, peristiwa tentang aksi radikalisme dan terorisme dikait-kaitkan dengan kepentingan golongan/ keyakinan agama tertentu. Dari sinilah, pertanyaan diskusi bersama informan dalam penelitian ini membahas tentang *stereotype* bahwa Islam di Indonesia identik dengan radikalisme. Pernyataan ini diajukan kepada informan untuk mengetahui bagaimana penerimaan mereka terkait pelabelan atas agama tertentu dalam praktik radikalisme di masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.

Informan Sheila menyatakan kesepakatannya bahwa Islam di Indonesia memang identik dengan radikalisme. Hal ini disampaikannya berdasarkan pengalamannya dalam berinteraksi dengan teks media yang seringkali juga mendekatkan Islam pada topik radikalisme.

"...Mungkin akan banyak yang tidak setuju jika dikatakan muslim identik dengan politik dan radikalisme. Tapi jika umatnya *dikit-dikit sensi-an baper-an* dan sulit dikritik, *gimana?* Dikritik *dikit* malah *playing victim* atau lebih parah, *disatronin* ke rumah *rame-rame*, mau *nggak* mau kan jadi tanda tanya, ada apa sama ideologinya? Kok *dikit-dikit* kekerasan..."

Nada sinis dalam pernyataan Sheila di atas memang cukup beralasan. Dalam diskusi mengenai pertanyaan ini, Sheila menjelaskan tanggapannya tersebut berdasarkan teks berita yang diberikan terkait aksi radikalisme yang menyatakan "*Banyak sekali ormas-ormas Islam di Indonesia yang memang terlanjur mempunyai political engagement dengan Arab Saudi melalui yayasan pendidikannya, lembaga pendidikannya dan sebagainya, yang memang itu menjadi kelemahan masyarakat Indonesia, Muslim.*" (www.bbc.com, edisi 23/02/17). Menurut Sheila, dalam banyak pemberitaan di media massa, tampilan karakter masyarakat muslim Indonesia nampaknya mudah terpancing emosi dan suka pada aksi kekerasan.

Hal senada juga disampaikan oleh Susilo yang sepakat bahwa kelompok muslim di Indonesia seringkali terjebak dalam pelabelan terorisme oleh media massa. "*Terorisme di Indonesia berbasis Islam, karena memang di Indonesia pemeluk Islam mayoritas, dan korbannya pun sebagian besar juga orang Islam,*" demikian kutipan pernyataan Susilo saat berdiskusi tentang Islam dan terorisme di Indonesia.

Label yang diberikan media atas kelompok agama ini kemudian menjadi kajian menarik lainnya dalam bahasan penelitian ini. Pasalnya, yang dimaksud Islam di Indonesia tidak bisa digeneralisasi secara umum dan menyeluruh pada seluruh umat muslim di Indonesia. Bahkan, aksi kekerasan maupun praktik radikalisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia bukanlah aksi keagamaan.

Menurut Fashri (2014: 30-32), konsep kekerasan dapat dilihat dalam tiga pengertian. *Pertama*, kekerasan dipandang sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor; *kedua*, kekerasan diartikan sebagai produk dari struktur; dan *ketiga*, kekerasan dipandang sebagai jejaring antara aktor dan struktur. Kekerasan yang dipandang sebagai tindakan aktor mengandung sisi destruktif (merusak) dan membawa kerugian – berupa ancaman, teror, pembunuhan, atau tindakan fisik lainnya pada pihak orang lain. Sedangkan pada konsep kekerasan yang dipandang sebagai produk dari struktur, menyatakan bahwa kekerasan lebih menunjuk pada upaya untuk menyumbat atau menghambat potensi yang dimiliki manusia agar tidak terealisasi secara aktual. Sehingga kekerasan struktural memiliki sifat tidak langsung, tidak tampak, statis, dan menyimpan stabilitas sistem tertentu. Dalam hal ini, mekanisme kekerasan struktural akan mengakibatkan distribusi yang tidak adil terhadap mereka yang berposisi subordinat. Kebalikan dari konsep kekerasan yang pertama dan kedua, pemahaman ketiga meneropong kekerasan sebagai rangkaian jejaring dialektis antara aktor dan struktur, dimana setiap hubungan kekerasan membentuk jejaring yang saling bertaut.

Pembahasan mengenai kekerasan dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari konteks radikalisme yang selalu ditunggangi aksi kekerasan. Apalagi mengingat Indonesia sebagai bangsa yang dihuni oleh beragam entitas dan sistem kepercayaan yang berbeda-beda. Indonesia yang dibangun dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, kemudian dijadikan bahan diskusi dalam mencari konsep keberagaman dari para informan.

Menurut **Sandy**, konsep keberagaman di Indonesia dapat dimaknai sebagai suatu cita-cita dan harapan bagi kehidupan berbangsa yang harmonis. Berikut adalah kutipan pernyataan Sandy terkait makna keberagaman yang seringkali menjadi pemicu praktik radikalisme di masyarakat.

“...Saya tetap optimis bahwa keberagaman yang ada di Indonesia bukanlah sebuah keniscayaan, tetapi

sebuah keindahan dan anugerah yang harus disyukuri. Meskipun ada berbagai aksi kekerasan dan ujaran kebencian atas nama perbedaan, termasuk agama, hal itu senantiasa mengingatkan dan menyadarkan saya untuk selalu mawas diri untuk peduli dan menghargai sesama yang mempunyai perbedaan dengan saya. Masih banyak orang Indonesia yang peduli akan keberagaman dan kebangsaan, dibandingkan yang menghendaki keseragaman, apalagi yang menggunakan kekerasan....”

Mencermati pemberitaan tentang aksi terorisme dan radikalisme di Indonesia, tentu saja berdampak pada persepsi dan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia. Dalam penelitian ini diskusi bersama para informan mencoba menggali pemaknaan *audience* media setelah membaca teks media (artikel berita yang menjadi bahan diskusi).

Dalam diskusi bersama informan Herlina, ia menyampaikan bahwa kesan Indonesia di mata dunia internasional masih berada pada level ‘aman.’ Dalam artian, citra/ *image* bangsa Indonesia ketika dikaitkan dengan topik radikalisme maupun terorisme tidak membuat nama Indonesia terpuruk. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sandy dalam pernyataannya mengenai anggapan dunia internasional terkait aksi terorisme di Indonesia dan dampaknya bagi Indonesia sendiri.

Herlina: Saya berkesan bahwa Indonesia masih dipandang berada pada spektrum yang aman dari isu intoleransi. Persoalan agama lebih merupakan ‘alat politik’ dan bukan semata mata perjuangan kaum *agonistic teokrasi* (cara memerintah negara berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah negara, hukum

negara yang berlaku adalah hukum Tuhan, pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan - KBBI).

Sandy: Terkait berbagai aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, dunia internasional masih percaya dan yakin Indonesia masih dapat mengatasinya. Buktinya, Indonesia tidak mengalami intervensi dan isolasi dari negara lain.

Pernyataan kedua informan (Herlina dan Sandy) tampak sama dalam menilai kesan Indonesia di dunia internasional. Meskipun latar belakang kedua informan ini berbeda, namun keduanya sepakat bahwa peristiwa radikalisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia tidak membuat nama Indonesia menjadi buruk dan tak terpendang. Menurut penuturan Herlina dalam diskusi lebih lanjut, ia menyatakan: "*Bentuk-bentuk terorisme saat ini lebih dikarenakan hasil radikalisasi atas interaksi dengan Taliban di Afganistan dan terutama para alumni Poso. Tidak ada satupun aktor pimpinan dari pelaku terorisme adalah Indonesia, seperti Dr. Ashari dari Malaysia. Dengan kata lain militansi di kalangan radikal Islam Indonesia cenderung tidak berbasis kekerasan, seperti HTI.*" Meskipun demikian, Herlina mengaku bahwa interaksinya dengan kolega yang awam terhadap isu terorisme di Indonesia memang cenderung memberikan stigma Islam di Indonesia sarat akan aksi kekerasan. Lagi-lagi menurut Herlina stigma tersebut terjadi karena merujuk pada peristiwa Bom Bali, FPI, dan Bom Kampung Melayu).

Indonesia dan konsep keindonesiaan dalam penelitian ini menjadi bagian yang juga tak terpisahkan. Para informan lalu diajak berdiskusi terkait konsep keindonesiaan yang ada dan dimaknai oleh mereka pribadi sebagai orang Indonesia. Berikut penuturan informan Herlina yang saat ini sedang menempuh gelar Doktor-nya di Eropa, terkait hal tersebut:

"...Agar terhindar dari *herding behavior* atau masyarakat kawan-an yang secara

kolektif berkumpul namun tidak memiliki tujuan yang tersentral, maka komitmen awal harus dijaga termasuk percaya pada kepemimpinan yang bekerja untuk rakyat. Pandangan saya atas kejadian akhir-akhir ini adalah refleksi dari masyarakat yang mengalami *quantum leap* (tujuan yang melompat) dari masyarakat tradisional ke masyarakat post-modern tanpa melampaui menjadi masyarakat modern. Akibatnya atribut-atribut yang seharusnya lebih kuat justru mengalami krisis identitas. Namun selama kita tidak lelah mencintai Indonesia, maka menjadi Indonesia adalah proyek yang tak kunjung usai (*Aufgabe*)..."

Pandangan Herlina sebagai orang Indonesia dalam bahasan mengenai radikalisme dan konsep keindonesiaan memang cukup unik. Meskipun pernyataan-pernyataan yang dilontarkan banyak berisi kritikan, namun latar belakang, pengetahuan, dan pengalamannya tentang Indonesia membuat Herlina terbuka akan perbedaan tanpa harus mengubah dirinya sendiri dalam mencintai Indonesia.

Dalam sub-bab ini banyak dijelaskan mengenai paham radikalisme yang dipandang sebagai bentuk tindakan kekerasan dan anarkis. Para informan sepakat bahwa bibit radikalisme yang tumbuh subur di masyarakat Indonesia dapat menjadi penyebab gagalnya pembasmian tindak kekerasan dan aksi terorisme. Radikalisme kemudian digunakan sebagai alat politik untuk melegalkan konflik-konflik kepentingan. Pada dasarnya radikalisme ini muncul karena adanya ketidak-puasan terhadap tatanan yang ada, ia menginginkan perubahan, biasanya utopis (Haryatmoko, 2014: 133). Cita-cita demokrasi dalam konsep keberagaman yang harmonis di Indonesia kemudian menjadi suatu keniscayaan yang utopis dan hanya bisa menjadi lebih riil apabila sistem politik kepentingan dan struktur kekuasaan dapat ditekan demi kebaikan bersama.

Kegamangan Menjadi Indonesia dalam Pemaknaan Negosiasi

Radikalisme dan terorisme terasa sudah sangat dekat dengan masyarakat Indonesia. Kedua kata tersebut dengan mudah ditemukan di lingkungan sekitar dan media. Terutama, peristiwa radikalisme dan terorisme seringkali menghiasi halaman utama media di Indonesia. Selain karena peristiwanya yang mengakibatkan korban jiwa, radikalisme dan terorisme seolah melekat menjadi sebuah konsep yang kemudian melekat pada umat Islam di negeri yang sangat majemuk ini. Indonesia, rumah dari segala kepercayaan dan pemeluk agama kemudian menjadi tidak nyaman dengan kehadiran peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal dan menjadi trauma bangsa.

Meskipun peristiwa radikalisme dan terorisme terjadi di sebagian kecil di wilayah Indonesia, namun peristiwa bergaung di seluruh penjuru nusantara. Apakah radikalisme, sebagai akar dari terorisme mudah dijumpai di seluruh nusantara dan atau menjadi pengalaman dalam bertumbuh kembang sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia? Berikut ini penuturan dari informan Seilla”

“...Ketika bersekolah: Materi yang dibawakan memang cukup *strict* dan sempat membuat kami terperangah. Begitu banyaknya ya dosa kami akan hal2 yang seharusnya dan tidak seharusnya kami lakukan. Belum lagi buku2 dan majalah yang materinya cukup ekstrem. Intinya sempat membuat saya bengong tidak bicara selama seminggu. Demikian pula saat kuliah. Namun saat bekerja sudah mulai berkurang...”

Sheila, perempuan asal Surabaya yang saat ini bekerja di Jakarta menuturkan bahwa di selama di sekolah dia menemukan ajaran-ajaran radikalisme. Ajaran-ajaran yang dia terima membuatnya merasa berdoa dan seolah

menyalahi ajaran agama. Dalam catatan Abdul Munip (2012: hal. 160) bahwa hasil *survey* yang dilakukan Lembaga Kajian Islam Perdamaian (LaKIP) Jakarta pada tahun 2010 sebanyak 48.9% siswa di Jabodetabek menyatakan persetujuannya terhadap aksi radikal. Sedangkan di lingkungan perguruan tinggi hasil *survey* tahun 2007 oleh Abdullah Fadjar dalam Munip (2012: hal. 160-161) menyatakan bahwa 65% mahasiswa mendukung *sweeping* kemaksiatan., 18% mendukung sekaligus berpartisipasi aktif dalam *sweeping*, 11% tidak mendukung dan 6% tidak memberikan jawaban. *Survey* dilakukan terhadap 2466 sampel mahasiswa dari perguruan tinggi ternama di Indonesia. Hasil *survey* tersebut sekaligus menegaskan mengenai apa yang dialami oleh informan juga dialami oleh banyak pelajar dan mahasiswa lainnya.

Sedangkan Herlina menyatakan bahwa bibit radikalisme juga ditemui di lingkungan sekitarnya meskipun begitu menurut pengamatan Herlina hal tersebut diakibatkan oleh migrasi masyarakat dari daerah konflik ke negara-negara yang lebih modern, aman, maju seperti Inggris. Berikut ini yang disampaikan oleh Herlina:

“...Hanya saja sejak masukkan imigran dari daerah konflik di Timur Tengah, mereka dituduh berkontribusi pada munculnya gerakan radikalisme di Eropa. Akar masalah tetaplah bahwa masyarakat imigran adalah kaum kelas 2 atau kelas 3 dari strata masyarakat yang cenderung tidak membaaur dengan budaya setempat dan bersifat tertutup memegang budaya asalnya. Saya menduga inilah akar masalah radikalisme di tempat saya tinggal saat ini, Eropa...”

Herlina, adalah kandidat doktor asal Indonesia yang saat ini study di Universitas Lancaster di Inggris. Dalam konteks tempat tinggalnya saat ini di Inggris, Herlina melihat bahwa bukan warga Inggris yang mempunyai bibit

radikalisme namun warga pendatang akibat migrasi besar konflik di Timur Tengah.

Apa yang disampaikan oleh Herlina dan Sheilla menunjukkan bahwa radikalisme ditemukan di institusi pendidikan dan lingkungan masyarakat. Dari penuturannya tersebut maka radikalisme sangat dekat dengan informan dan mudah untuk ditemui. Meskipun mudah ditemui namun mereka berdua menyatakan bahwa sebenarnya tidak mudah 'bersentuhan' atau berinteraksi langsung dengan kelompok fundamentalisme tersebut. Hal ini dikarenakan, mereka tidak berasal dari kalangan yang dikenal oleh keduanya. Dalam wawancara lanjutan, kedua informan menyatakan bahwa tidak mengenal secara langsung kelompok fundamentalis tersebut. Kedua informan juga mengamati bahwa akar-akar fundamentalisme agama meski mudah ditemui di lingkungan mereka namun 'mereka' bukan bagian dari kehidupan kedua informan.

Fundamentalisme agama yang terjadi di Indonesia kemudian identik dengan Islam yang dalam perjalanannya kemudian berkamufase menjadi terorisme. Menjadi bangsa yang disorot sebagai sarang teroris tentu tidak nyaman bagi banyak kalangan. Indonesia yang dikenal pada masa kolonial sebagai bangsa di timur jauh yang baik, ramah, mudah akrab dengan bangsa lain kemudian menjadi identik dengan sarang teroris. Peristiwa demi peristiwa yang merujuk pada aksi terorisme kemudian menjadikan Indonesia identik dengan terorisme. Apalagi kemudian terorisme diidentikkan dengan Islam, dimana Indonesia adalah negara dengan penduduk Islam besar di dunia. Meski dengan penduduk terbesar memeluk agama Islam, namun Indonesia adalah rumah besar bagi banyak penganut kepercayaan dan agama. Narasumber Herlina bahwa,

"...Jika keidentikan terorisme dikaitkan dengan agama Islam yang mayoritas sekitar 80% di Indonesia, maka perilaku *insecure* ini perlu dipertanyakan. Nampaknya problem identitas kaum Islam yang saat ini mengalami masalah. Didukung rumah-rumah ibadah yang

para pemimpin umatnya tidak mengalami indoktrinasi dari lembaga tertinggi sebagai payung agama tersebut. Akibatnya tidak ada pengawasan atas dakwah-dakwah yang dilakukan di Masjid. Semua bebas menginterpretasikan ayat maupun dakwahnya. Intinya tidak ada mekanisme kontrol dan pengawasan dari agama Islam itu sendiri..."

Herlina, meskipun dia setuju bahwa Indonesia identik dengan 80% mayoritas beragama Islam, namun Herlina memberikan pernyataan mendasar apakah persoalan mayoritas ini kemudian menjadikan kualitasnya juga bagus. Herlina menyatakan tentang perilaku *insecure* (perilaku radikalisme) adalah tersebarnya interpretasi yang beragam di kalangan umat Islam dan tidak-hadiran negara di bilik-bilik ibadat umat Islam. Hal ini kemudian berujung pada identitas umat Islam sendiri yang kemudian beragam. Herlina melihat bahwa keberagaman umat Islam justru menjadikan sel-sel radikalisme bertumbuh tampak kendali. Pengendalian yang ditawarkan oleh Herlina adalah adanya lembaga yang secara resmi kemudian mengawasi terselenggaranya ibadah. Lembaga ini sekaligus akan melindungi dan menjamin hak warga negara untuk beribadah dengan nyaman dan sekaligus juga untuk menekan akar-akar radikalisme yang tumbuh di akar rumput.

Sebagai masyarakat beragama yang mayoritas di Indonesia, rupanya hal tersebut tidak membuat penganut Islam kemudian menjadi berkualitas secara pendidikan. Dalam kajian lainnya, Ahmad Syafii Maarif (Maarif, 2009: 224) melihat bahwa pendidikan adalah dasar dan sumber masalah mengapa di Indonesia kuantitas tidak selaras dengan kualitas umat Islam. Kualitas yang tertinggal jauh dan hanya membanggakan persoalan kuantitas akan menjadi persoalan besar. Bahkan Maarif menyebutkan jika pendidikan tidak diperbaiki maka akan menjadi kelumpuhan bangsa ini. Selain pendidikan, Maarif (2009: 258) juga

mempersoalkan bagaimana kemiskinan menjadi kunci dari persoalan kuantitas minus kualitas. Pemberdayaan ekonomi pada kelompok mayoritas ini menjadikan bangsa ini lemah. Maka pemerintah, diharapkan mampu memberikan sarana dan prasarana agar kemajuan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia ini menjadi prioritas pembangunan. Dalam kajiannya, Maarif menghitung bahwa jika 40% bangsa ini miskin maka 90% dari angka tersebut pastilah umat Islam.

Dalam bahasa yang berbeda Sheila mengatakan demikian:

“Mungkin akan banyak yang tidak setuju jika dikatakan muslim identik dengan politik dan radikalisme, tapi jika umatnya *dikit-dikit sensian baperan* dan sulit dikritik, dikritik *dikit* malah *playing victim* atau lebih parah, *disatronin* ke rumah *rame-rame*, mau *nggak* mau *kan* jadi tanda tanya, ada apa sama ideologinya. *Kok dikit-dikit* kekerasan.

Sheila melihat bahwa sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam justru menunjukkan wajah yang sulit untuk disentuh dan eksklusif. Meskipun demikian Sheilla memulai argumennya dengan kata “mungkin”. Sayangnya penyebutan mayoritas ini sulit dikuantifikasikan. Sulit disentuh dan eksklusif tersebut tampak dari sulitnya untuk berdialog dan mengandalkan kekerasan jika terjadi perbedaan wacana atau pandangan terhadap Islam. Islam yang terbuka untuk berdialog adalah tawaran Sheilla untuk bisa saling memahami antar umat beragama, Islam khususnya sebagai agama mayoritas di Indonesia.

Tuntutan agar Islam terbuka dengan berbagai pandangan ditegaskan oleh Maarif (2009: 188-189) demikian, bahwa mengenai kultur toleransi dalam hidup bermasyarakat bagi umat Islam. Eksistensi keberagaman yang tak mungkin ditolak di muka bumi ini . dalam situasi keberagaman itulah mengembangkan sikap hidup yang harmonis, aman dan damai serta kultur yang lapang dada

(terbuka, pen) sebagai alat utama untuk bisa hidup berdampingan dengan nyaman. Sikap yang lapang dada, ditegaskan oleh Maarif sebagai sikap yang percaya diri dan bukan suasana batin yang tak berdaya. Namun dalam masyarakat yang belum dewasa secara psikologis, perbedaan seringkali dianggap sebuah permusuhan. Bahkan dalam sejarah peradaban, gesekan-gesekan perbedaan pendapat justru akan melahirkan peradaban baru yang jauh lebih baik. Maarif, dalam pendapatnya tersebut mengajak untuk mengedepankan dialog untuk menuju peradaban baru yang jauh lebih baik. Diskusi-diskusi dibuka dalam sikap toleransi dan terbuka terhadap keberagaman.

Dalam *Reception Analysis* tanggapan tentang isi berita menjadi penting dalam memosisikan informan berikut tanggapan informan Sandy:

“Sejauh ini, pemberitaan tentang terorisme di Indonesia tergantung siapa yang memberitakannya, dalam artian media tersebut milik siapa dan punya kepentingan apa. Hal ini dapat dilihat ada media yang sangat negatif memberitakan tentang terorisme, namun ada juga yang memberitakan secara berimbang. Untuk itu, saya sebagai konsumen harus pintar-pintar memilih dan membaca berita yang ada dan mengecek kebenaran berita tersebut”

Sandy memahami bahwa memaknai sebuah peristiwa tidak langsung serta merta mempercayai sumber informasi dalam hal ini sumber informasinya adalah media. Sandy memperhitungkan latar belakang siapa yang melakukan pemberitaan termasuk kepentingan dari pemilik media. Sebagai konsumen media, Sandy bahkan melakukan cek-richek dengan media lain berkaitan dengan topik yang sama. Maka apa yang disampaikan Sandy dalam sesi wawancara menampilkan bagaimana Sandy bersama rekan-rekannya melakukan cek dalam proses pemaknaan isi berita sehingga pemaknaannya menjadi kompleks. Selain itu, Sandy terbiasa

diskusi dengan rekan-rekannya, maka dari itu apa yang disampaikan Sandy merupakan sebuah kesepakatan bersama rekan-rekannya.

Pada posisi pemaknaan negosiasi, para informan menyadari bahwa radikalisme dan terorisme dekat sekali dengan lingkungan mereka baik secara fisik maupun psikologis. Namun para informan juga menyadari bahwa radikalisme dan terorisme bukanlah bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia secara mendasar. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi radikalisme dan terorisme berkembang yaitu kurangnya kontrol dari pemerintah, informasi dari luar, ketegangan politik di daerah-daerah konflik dan juga menjadi faktor yang mempengaruhi. Globalisasi dan perkembangan teknologi memungkinkan informasi menyebar luas seperti yang dicita-citakan oleh McLuhan dengan *global village*-nya.

Indonesia bukan satu Bentuk dalam pemaknaan Oposisi

Pada kutub ekstrem pemaknaan yaitu pada oposisi atau menolak berikut ini tanggapan dari informan Susilo:

"...Tidak ada bibit-bibit radikalisme di lingkungan kami, karena wilayah kami termasuk wilayah yang mengedepankan toleransi, *tepa selira* dan *ewuh-pakewuh*. Saya tidak setuju bila dinyatakan bahwa "Islam di Indonesia identik dengan radikalisme" sebab tidak semua orang Islam setuju dengan radikalisme, dan saya yakin orang Islam di Indonesia mayoritas (95%) tidak senang dengan kelakuan mereka yang radikal..."

Susilo adalah seorang Kepala Desa di sebuah desa di Kabupaten Madiun. Dalam pengamatannya saat ini belum ditemukan bibit radikalisme di wilayah admistrasinya. Masyarakat di Desa tersebut yang masih mengedepankan

toleransi menjadikan kehidupan masyarakat desa menjadi lebih guyub dan saling menjaga (*tepa selira*). Khas warga pedesaan dimana sebagian besar masyarakatnya merupakan masyarakat agraris dan masih melakukan ritual adat Jawa masyarakat setempat misalnya melakukan bersih desa, selamatan, dan juga ritual khas masyarakat Jawa. Apa yang disampaikan Susilo ini adalah wajah Islam yang toleran dan damai sekaligus memberi ruang bagi budaya masyarakat untuk bisa berdampingan bersisian hidup bersama tanpa pemaksaan aliran agama. Maarif (2009: hal. 34-35) menjelaskan bahwa Islam datang ke wilayah nusantara dengan damai. Sebelum kedatangan Islam, Hindu dan Buddha sudah merajai nilai-nilai di masyarakat. Hal ini terbukti dengan berdirinya pusat-pusat agama Hindu dan Buddha di berbagai wilayah di nusantara hingga kemudian muncullah Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13. Disebutkan oleh Maarif juga bahwa sekalipun secara kuantitatif Islam telah mampu menggeser kepercayaan Hindu dan Buddha, namun karena kedatangannya dengan damai maka secara kualitatif sisa-sisa peninggalan lama masyarakat nusantara masih dipertahankan. Hal ini relevan dengan pernyataan informan Susilo bahwa Islam di lingkungannya sangat damai dan hidup berdampingan dengan aman dengan nilai-nilai budaya lama. Susilo menambahkan, "*coba lihat sekarang, muslim jadi mayoritas, kemana agama-agama asli Nusantara? Prasasti-prasasti diberangus. Di abad 15 Majapahit masih ada, di abad 21 kita mencari lokasi pusat pemerintahannya saja sulit..*"

Demikian pula yang disampaikan oleh Sandy yang tidak setuju jika Islam diidentikkan dengan radikalisme dan terorisme. Berikut ini pernyataan Sandy,

"...Saya tidak setuju akan pernyataan bahwa Islam di Indonesia identik dengan radikalisme. Bagi saya, radikalisme terkait dengan oknum atau kelompok tertentu, yang secara kebetulan dibungkus dalam agama Islam... Itu hanya-lah ulah oknum atau kelompok tertentu saja yang

menggunakan Islam untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat agar tujuan pribadi/kelompoknya terwujud...”

Berbeda dengan Susilo yang melihat sekitarnya penuh toleransi dan hidup guyub rukun berbagai pandangan dalam menjalani hidup, Sandy secara tegas menyatakan bahwa radikalisme bukan identik dengan Indonesia. Indonesia dalam kacamata Sandy adalah masyarakat yang toleran dan damai. Jikalau ada aksi radikalisme maka hal tersebut dilakukan oleh oknum tertentu saja, namun bukan identitas masyarakat Indonesia secara umumnya. Bahkan Maarif (2009: hal 35-36) menjelaskan bahwa gerakan Islam puritan di Sumatera Barat pada abad ke-19 menemui banyak kesulitan kultural dalam menghadapi lapisan nilai-nilai lama yang telah ada sebelumnya.

Senada dengan informan lainnya Herlina melihat bahwa Islam Indonesia bukanlah radikal meskipun kontestasi kepentingan masyarakat memungkinkan perubahan konstelasi masyarakat.:

“...Jadi hemat saya Islam Indonesia bukanlah Islam radikal. Indonesia tidak memiliki sejarah fundamentalis seperti WAHABI di Arab Saudi, atau Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. Barangkali perlu pembuktian lebih dalam, hanya pada disertasi Amin Rais berjudul *The Muslim brotherhood in Egypt: Its Rise, Demise and Resurgence*, nampak bahwa radikalisme dan fundamentalisme memiliki kaitan dengan kepentingan global.

Islam Indonesia adalah Islam Radikal? Untuk saat ini saya katakan tidak, akan tetapi metamorfosis sebuah gerakan bisa saja terjadi. Semua tergantung pada struktur dan kontestasi masyarakat...”

Sandy juga sepakat dengan Herlina bahwa aksi radikalisme dan terorisme di Indonesia bukanlah karakter Indonesia. Demikian pernyataan Sandy:

Menurut saya, berbagai aksi terorisme di Indonesia adalah upaya untuk memperoleh pengakuan atas keberadaannya dengan memanfaatkan keberagaman yang ada di Indonesia. Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok yang berorientasi pada ideologi Islam tersebut, lebih banyak yang bersifat radikal, militan, dan bahkan fundamentalis. Sehingga momentum reformasi yang memberikan kebebasan berpendapat, seringkali digunakan oleh kelompok ini untuk menyuarakan aspirasinya secara radikal. Dan yang tidak kalah menariknya, kelompok ini sangat banyak mempunyai pendukung. Saya tetap optimis bahwa keberagaman yang ada di Indonesia bukanlah sebuah keniscayaan, tetapi sebuah keindahan dan anugerah yang harus disyukuri. Meskipun ada berbagai aksi kekerasan dan ujaran kebencian atas nama perbedaan, termasuk agama, hal itu senantiasa mengingatkan dan menyadarkan saya untuk selalu mawas diri untuk peduli dan menghargai sesama yang mempunyai perbedaan dengan saya. Masih banyak orang Indonesia yang peduli akan keberagaman dan kebangsaan, dibandingkan yang menghendaki keseragaman, apalagi yang menggunakan kekerasan.

Indonesia damai yang berdiri atas keberagaman bukanlah sesuatu keniscayaan. Sandy melihat bahwa Indonesia yang beragam justru menjadi modal dan kekayaan luar biasa. Maka dari itu, kemauan untuk terus memahami dan belajar dengan perbedaan adalah sebuah keharusan yang tiada akhir selama menjadi Indonesia. Maka Herlina sepakat bahwa terorisme harus diberantas karena mencoba untuk mengganti dasar negara. Demikian pernyataan Herlina, "*...Teroris menganggap pemerintahan thogut dan ingin mengganti dasar negara, menegakkan khilafah. Terorisme jika dibiarkan pasti akan memberangus keberagaman dan mendiskriminasi agama-agama lain...*". Sandy melihatnya dari sisi kemanusiaan bahwa terorisme dan radikalisme sebenarnya mengguncang rasa kemanusiaan kita yang paling mendasar. Berikut yang disampaikan Sandy

"...Aksi pemboman adalah tindakan yang biadab. Para pelaku bom tidak menyadari bahwa dirinya adalah sama seperti korban bom yang diakibatkannya. Pelaku dan korban adalah sama-sama manusia. harkat dan martabat mereka sama. Ketika peristiwa bom terjadi, maka terjadi pula penderitaan dan kesengsaraan manusia. Ketika korban itu meninggal dunia, maka keluarga dan sanak saudaranya akan menderita duka yang mendalam. Mereka kehilangan orang yang dicintai. Begitu pula, bila korban itu masih hidup. Akan ada banyak kemungkinan yang terjadi padanya. Ia bisa menderita cacat fisik. Ia bisa menderita luka batin dan psikis. Inilah letak kebiadaban pada pelaku terorisme. Paham dan kebenaran yang mereka yakini, mengabaikan dan melupakan harkat dan martabat manusia..."

KESIMPULAN

Keindonesiaan kita seolah terguncang tatkala aksi terorisme radikalisme kembali terjadi. Mempertanyakan keindonesiaan kita sebagai anak bangsa tatkala sisi kemanusiaan kita kemudian terkoyak oleh aksi-aksi kekerasan yang berbalut kepentingan sempit. Maka menarik sekali bagaimana anak bangsa mencoba memahami dan memaknai aksi-aksi kekerasan yang terjadi. Pada pemaknaan dominan hegemonik, bahwa aksi terorisme radikalisme bukanlah karakter bangsa. Sedangkan dalam pembacaan negosiasi melihat bahwa aksi radikalisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia ditunggangi oleh kepentingan. Sedangkan dalam pembacaan oposisi menolak dengan tegas bahwa Indonesia identik dengan radikalisme. Dari ketiga pemaknaan tersebut maka kesimpulan dari penelitian ini adalah terorisme dan radikalisme tidak mengguncang rasa keindonesiaan yang beragam, toleran dan terbuka terhadap perubahan.

PERNYATAAN

Penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian "Analisa Pemaknaan (*Reception Analysis*) Masyarakat Indonesia Terhadap Konsep Keindonesiaan Melalui Pemberitaan Tentang Indonesia Konteks Internasional Tahun 2016-2017" yang dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Kontrak Penelitian Nomor: 357A/WM01.5/N/2017.

REFERENSI

- Anholt, S. (2007). *Competitive Identity The New Brand Management For Nations, Cities and Regions*. Brittain :Palgrave Macmillan.
- Fashri, F. (2014). *Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalasutra.

McQuail, D. (1997). *Audience Analisis*. California: Sage Publication.

Maarif, A.S. (2009). *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan (Sebuah Refleksi Sejarah)*. Bandung: Mizan.

Mujiburrahman. (2008). *Mengindonesiakan Islam Representasi dan Ideologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haryatmoko. (2014). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.

Hartley, J. (2002). *A Short History of Cultural Studies*. New York: Sage Publications.

Ida, R. & Subiakto, H. (2014). *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana.

Musyafiq, A. (2012). Spiritualitas kaum fundamentalis. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), 55-78.

Mukodi, M., & Burhanuddin, A. (2016). *Islam Abangan Dan Nasionalisme Komunitas Samin di Blora*. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), 379-400.

Munip, A. (2012). Menangkal radikalisme agama di sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 159-181.

Siregar, A., Et.All. (1998). *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius.

Zuhdi, M. H. (2017) *Radikalisme Agama Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan*. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 199-224

Online News Sources:

Asmoro. (2017). Indonesia Darurat Radikalisme Bagian Satu : DI/TII Akar Radikalisme Di Indonesia. *Seword*. Available at <https://seword.com/politik/indonesia-darurat-radikalisme-bagian-satu-ditii-akar-radikalisme-di-indonesia/>

Fachrur, Rozi. (2017). Radikalisme Ancaman Nyata Pemuda Tanah Air. Liputan6. Available at <http://news.liputan6.com/read/3034980/radikalisme-ancaman-nyata-pemuda-tanah-air>

Sa'dullah, Affandy. (2016). Akar Sejarah Gerakan Radikalisme Indonesia. Wahid Foundation. Available at <http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Akar-Sejarah-Gerakan-Radikalisme-di-Indonesia>

Fathurrohman Ghufroon. (2017). Radikalisme dan Politik Identitas. Kompas. Available at <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/05/19170871/radikalisme.dan.politik.identitas>

Catatan Akhir

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa.." (QS. al Baqarah [2]: 126). "Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekkah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala." (QS. Ibrahim [14]: 35). "Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah)" (QS. al-Balad [90]: 1). "... (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun." (QS. Saba' [34]: 15). "Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman" (QS. Saba' [34]: 18).